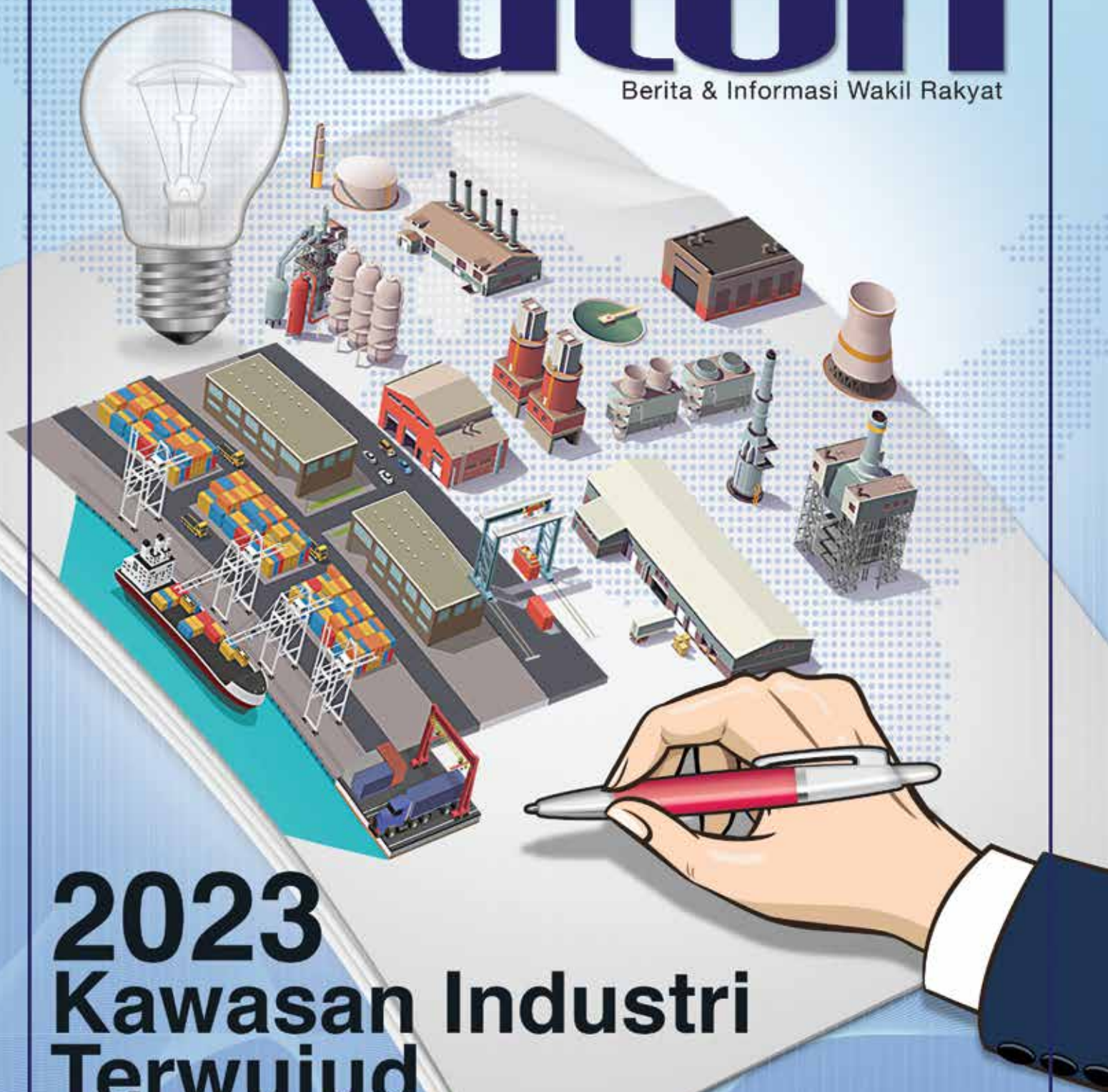




Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



2023 Kawasan Industri Terwujud

Refleksi Sang Merah Putih



Pada tiap Agustus, kita selalu disuguhkan pemandangan dengan berbagai macam model, ukuran dan bentuk bendera merah putih yang berkibar di seluruh penjuru tanah air.

Di desa, di kampung, di rumah, di kantor, juga di sekolah, kendati saat ini kita masih berada di situasi pembatasan sosial. Pengibaran ini dilakukan agar tetap memupuk rasa nasionalisme.

Pasalnya, saban Agustus, kita kembali memperingati sebuah momen yang sangat bersejarah dan sakral bagi kita, bangsa Indonesia. Dimana bangsa kita mengenang proklamasi kemerdekaan pertama dengan mengibarkan sang merah putih.

Bendera sang saka, memiliki makna yang mendalam bagi negara Indonesia. Makna dari warna merah adalah berani atau keberanian manusia. Warna merah juga bisa diartikan sebagai warna dasar tubuh manusia, yang dialiri darah sejak lahir.

Sementara warna putih memiliki makna kesucian, yang

menggambarkan warna ruh manusia yang bersih.

Jika digabungkan, warna merah putih yang terdapat pada bendera nasional negara Indonesia ini memiliki banyak makna. Salah satunya adalah keberanian dan kebersihan.

Pada edisi kali ini, Cirebon Katon menyajikan tema investasi dan rencana kawasan industri yang direka Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sama halnya dengan makna sang saka merah putih. Tanpa keberanian, maka rencana kawasan industri juga tak akan bisa diraih.

Begitu pun tanpa kesucian atau kebersihan diri kita, pemerintah, masyarakat dan semua elemen untuk menerima dan bergerak dengan kebersihan hati. Maka harapan mengubah peningkatan ekonomi dan pendapatan, tentu juga tak akan pernah tercapai.

Seluruh jajaran redaksi Cirebon Katon mengucapkan Selamat HUT RI ke 76. Dirgahayu Indonesia. Selamat membaca Cirebon Katon.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Siska Karina, MH
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Sulianingrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Yayan Sunarya, SH
(Kasubag Persidangan dan Riset)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi :

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS
Capaian Investasi
Cirebon Hanya Kebagian Remah

8 | Bupati Cirebon: 2023 Miliki Kawasan Industri

**14 | Direktur Eksekutif HKI Fahmi Shahab:
Kabupaten Cirebon Masuk Syarat
Kawasan Industri 4.0**



18 | PUBLIKA
Keluhan Praktik Judi dan Prostitusi Liar



20 | INSPIRASI
Perpustakaan Pedati Bayalangu
Sempat Diundang ke Istana Presiden



22 | LENSA
Memori Kemerdekaan



24 | PROFIL
Pandi, SE
Jadi Pemimpin Berbagai Lembaga

26 | Diah Irwany Indriyati
Pandai Baca Peluang Jadi Pebisnis Ulung

28 | DINAMIKA
Komisi I Fasilitasi Sangketa Kepemilikan
Lahan Desa Astana

30 | Komisi III Ingatkan PT Longrich Lapor Rutin

32 | Prakarsai Perubahan Perda Sampah

34 | Komisi IV Pertimbangkan Relokasi SDN 1 Bendungan



36 | POTENSI
Buah Naga Sedong
Geliat Baru Agrowisata



38 | DESA
Ciwaringin
Ingin Dirikan Kampung Wisata Batik

Capaian Investasi Cirebon Hanya Sebagian Remah

Capaian investasi Kabupaten Cirebon pada semester I 2021 telah berkontribusi pada PAD. Namun sudahkah memberi kontribusi besar terhadap target capaian investasi Provinsi Jawa Barat?



Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia hingga semester I 2021 mencapai Rp 442,8 triliun atau 49,2 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp 900 triliun.

Berdasarkan lokasi, senilai Rp 214,53 triliun atau 48,5 persen berada di Jawa. Dengan penyumbang tertinggi diperoleh Jawa Barat sebanyak Rp 72,46 triliun atau 56,90 % dari target investasi Provinsi Jawa Barat sebesar Rp127,34 triliun.

Selain itu, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing

(PMA) berdasarkan lokasi proyek, Jawa Barat juga penyumbang tertinggi dengan nilai Rp 37,1 triliun. Dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp 23,3 triliun. Bagaimana dengan nilai capaian investasi di Kabupaten Cirebon?

Capaian Turun dari Target Investasi

Salah satu prasyarat iklim potensi investasi yang baik bagi daerah, adalah tersedianya infrastruktur sebagai jalur penghubung, ketersediaan air, jaringan komunikasi dan aliran listrik yang memadai.

Kabupaten Cirebon adalah salah satu dari sekian yang memiliki elemen itu. Dimana telah memiliki



aset infrastruktur yang melintang dan bersinggah semua jalur. Sebut saja dari tersedianya 5 pintu gerbang tol, stasiun kereta, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga pelabuhan.

Aset ini dirasa akan mendukung konektivitas wilayah yang memudahkan lalu lintas logistik barang nantinya. Terlebih letak geografisnya yang mendukung pengembangan program pembangunan Provinsi Jawa Barat.

“Kabupaten kita ada di tengah-tengah. Kita punya tol, bandara, pelabuhan dan stasiun. Ini tentu potensi yang baik untuk iklim investasi,” ujar Bupati

Cirebon Imron Rosyadi, pada kegiatan Seminar Saber Investasi, Juli 2021 lalu.

Hanya saja, potensi investasi yang cukup besar tersebut masih menyimpan catatan. Pasalnya capaian realisasi investasi di Kabupaten Cirebon yang mencakup PMA maupun PMDN dirasa belum memenuhi gol target maupun berkontribusi besar terhadap provinsi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono menerangkan, hingga Juli 2021 misalnya, realisasi investasi baru mencapai Rp 1,2 triliun dari target Rp 2,4 triliun. Sementara pada 2020 realisasi investasi menyerap Rp 1,3 triliun dari target sebesar

Rp 2,2 triliun. Hanya pada 2019, nilai investasi mampu mencapai Rp 1,7 triliun, melampaui targetnya sebesar Rp 1,4 triliun.

Capaian tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Terhitung sejak 2019 hingga triwulan II tahun 2021 total penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk baru 37.037 orang.

Jumlah tersebut, tentu belum cukup untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Cirebon. Pasalnya dilihat dari data BPS angka pengangguran terbuka pada 2020 saja sejumlah 122.145 orang.

Meski begitu, Sugeng melaporkan, jika nilai investasi hingga Juli 2021, telah menyumbang pada PAD sejumlah Rp 4 miliar. Ia pun meyakini angka capaian investasi Kabupaten Cirebon akan mencapai target 2021.

Namun jumlah itu, dirasa masih jauh dari harapan, angka Rp 2,4 triliun yang digadang oleh Pemkab Cirebon hanya beberapa persen menyumbang pada target investasi Jawa Barat.

Sugeng merinci, deretan sektor terbesar investasi di Kabupaten Cirebon berasal dari industri pengolahan senilai Rp 793 miliar yang disusul sektor *real estate* Rp 225 miliar dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial sebesar Rp 114 miliar.

Urutan ketiga, diduduki sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor yang mampu berkontribusi hingga Rp 30 miliar. Terakhir, sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan yang meraup Rp 13 miliar.

“Itu semua dari total jumlah investor tahun ini sebanyak 210. Yang terdiri dari 4 investor PMA dan 206 investor PMDN,” jelas Sugeng.

Menurut Sugeng, ada beberapa



pa hal yang menyebabkan capaian investasi tahun ini menurun dibandingkan 2 tahun lalu. Pertama, penurunan akibat adanya krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Ia pun belum dapat memprediksi, nilai capaian investasi pada tahun ini. Pasalnya hingga kini pagebluk belum terlihat melandai. Karena itu ia berharap agar pandemi ini segera berlalu. Sehingga iklim investasi di Kabupaten Cirebon dapat kembali membaik dan kondusif.

“Perekonomian secara makro selama pandemi ini kan minus. Jadi secara otomatis mengakibatkan turunnya investasi. Apalagi banyak warga pekerja asal kabupaten Cirebon di daerah lain yang juga mengalami putus kerja,” ujarnya.

Perlu Revisi RTRW

Selain dampak pandemi, faktor penyebab lainnya, kata Sugeng, belum adanya revisi penyempurnaan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal dengan diluncurkannya kawasan

segitiga rebana yang meliputi Cirebon, Majalengka, Subang sejak 2019 lalu seharusnya menjadi alasan revisi RTRW disegerakan.

“Kalau Kabupaten Subang dan Majalengka sudah telah lebih dulu merevisi RTRW. Namun, Kabupaten Cirebon belum melakukannya,” ungkapnya.

Sehingga, hal itu berpengaruh pada ketidakjelasan pemetaan kawasan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon. Akibatnya membuat beberapa perusahaan dan investor terpaksa menunda rencana berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Cirebon.

“Misalnya kita lihat di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang sebenarnya cocok untuk segala investasi. Cuma beberapa investor belum berani masuk saat ini untuk berinvestasi,” katanya.

Sugeng juga menerangkan, beberapa faktor pendorong agar nilai investasi di Kabupaten Cirebon dapat ditingkatkan, yakni tersedianya infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah, serta sumber daya listrik dan air yang memadai.

“Sementara kalau di Kabupaten Cirebon bagian timur terutama sepanjang jalan pantura sudah terkontaminasi oleh air laut. Sehingga kadar airnya masih di bawah ambang batas. Kondisi demikian harus disesuaikan dengan jenis perusahaan yang masuk,” ungkapnya.

Untuk itu, Sugeng menegaskan, agar ada pembangunan baru di Kabupaten Cirebon, maka perda RTRW harus segera diubah.

Sementara mengenai perizinan bagi investor, Sugeng mengakui, kalau perizinan investasi sebenarnya tidak sulit. Hanya saja persyaratan administrasi dan rekomendasi yang membuat durasi tempuhnya jadi lama.

“Persyaratan administratif mencakup biodata perusahaan. Sedangkan persyaratan teknis berupa rekomendasi dari DLH, PUPR dan lain-lain. Kita ada di pintu terakhir setelah investor selesai persyaratan teknis. Kalau persyaratan teknis selesai, maka produk perizinannya ada di kita. Dan insyaallah akan selesai satu hari juga,” katanya. •**Muiz**

Optimis Capai Target Investasi 2,4 Triliun

DPMPTSP Kabupaten Cirebon optimistis target investasi sebesar Rp 2,4 triliun pada tahun ini akan tercapai. Apa yang akan dilakukan?



Meski masih di situasi pagebluk, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan capaian investasi tetap menggelora. Hal ini sebagaimana laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.

Hingga Juli 2021, DPMPTSP mencatat, investasi yang masuk telah mencapai Rp 1,2 triliun. Yang berarti, realisasi tersebut telah terakumulasi senilai Rp 7 triliun atau 82 % dari target investasi RPJMD 2017-2021 senilai Rp 8,5 Triliun. Bahkan, capaian tersebut membawa Kabupaten Cirebon menduduki peringkat

ke 7 kota dengan investasi tertinggi se Jawa Barat.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono mengatakan, sejumlah investasi telah bergulir. Dimana sektor penyumbang terbesar berasal dari industri pengolahan senilai Rp 793 miliar. Disusul, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp 114 miliar.

Sementara, jumlah investasi yang masuk tahun ini sebanyak 210 investor. Terdiri dari 4 investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan 206 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan dan percepatan investasi, Pemkab Cirebon

juga telah membentuk tim satuan tugas (satgas) percepatan investasi. Tujuannya agar kemudahan investasi dan berusaha di Kabupaten Cirebon dapat dirasakan.

“Tim pelaksana ini terdiri dari SKPD, unsur TNI-POLRI, Kejaksaan, dan diketuai oleh Bupati. Kita akan mensukseskan rencana investasi,” jelas Sugeng.

Sugeng menargetkan investasi sebesar Rp 2,4 triliun pada tahun ini akan dapat terwujud. Ia optimis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.

Sementara ini, kata Sugeng, berbagai upaya telah dan akan DPMPTSP lakukan untuk meningkatkan capaian investasi. Pertama, DPMPTSP telah menggelar pameran investasi secara daring atau *online* kepada para calon investor.

“Hasilnya banyak yang berminat. Mulai investor dari China, Taiwan hingga India. Ada beberapa yang sudah masuk di kita, baik yang baru datang maupun yang sudah mulai,” ungkapnya.

Kedua, DPMPTSP telah menerapkan pelayanan perizinan investasi dengan sistem *online*. Tujuannya untuk memudahkan bagi calon investor ketika mendaftar berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Cirebon.

“Tanda tangan perizinan di kita sudah 75 persen memakai elektronik. Ya, paradigmanya harus digital melayani. Mengerangi tatap muka. Teman-teman di SKPD juga sedang menyesuaikan,” katanya. •**Muiz**

Bupati Cirebon: 2023 Miliki Kawasan Industri

Bupati Cirebon Imron Rosyadi bertekad tingkatkan nilai investasi dan menargetkan miliki kawasan industri pada 2023 nanti. Seperti apa langkahnya?



Berbagai hambatan investasi di Kabupaten Cirebon membuat kota ini acap disebut tak ramah investor. Di antara persoalannya, banyaknya premanisme, pembebasan lahan yang susah hingga penolakan secara sosial dan praktik pungli. Belum lagi proses perizinan perusahaan juga dinilai cukup rumit dengan banyaknya instansi yang terlibat.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi berjanji, akan membenahi birokrasi sebagai upaya mempermudah perizinan tanpa ber-

belit-belit, agar perusahaan yang masuk bisa cepat beroperasi. Pasalnya ia menginginkan nilai investasi Kabupaten Cirebon dapat ditingkatkan.

Langkah konkretnya, Imron telah mengeluarkan surat keputusan dengan membentuk satuan tugas percepatan investasi dalam rangka mempermudah investasi dan kemudahan berusaha pada Juli 2021 lalu. Hal itu sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) No 11 tahun 2021 tentang Percepatan Investasi.

Melalui satgas, Imron ber-

harap akan dapat menyelesaikan seluruh persoalan investasi. Dari mulai pembenahan regulasi dan pemangkasan birokrasi untuk menggenjot capaian investasi.

Di antara tugasnya, pertama, satgas harus memastikan realisasi investasi bagi setiap pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memiliki perizinan. Kedua, menyelesaikan secara cepat hambatan bagi sektor yang terkendala perizinan berusaha.

Ketiga, mendorong perce-



patan usaha bagi sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, pengembangan ekonomi dan lapangan kerja. Selanjutnya, mempercepat pelaksanaan kerjasama antara investor dengan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berada di daerah.

Terakhir, satgas berkewenangan memberikan rekomendasi pelanggaran administratif kepada kementerian atau otoritas pemerintah bagi para oknum pejabat yang melakukan pungli.

"Kita ingin semua sektor saling mendukung baik keamanan dan pertahanan, agar rencana percepatan investasi bisa terwujud," kata Imron.

Saat ini, Imron mengaku tengah menggodok pendirian kawasan industri di timur Cirebon sebagai cara menarik para investor. Imron berharap, dengan terbukanya kawasan industri, nan-

tinya akan mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran.

Namun, ia pun tetap mengingatkan agar para investor yang akan menanamkan modalnya, harus juga mengikuti aturan yang berlaku, seperti memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

"Kebijakan-kebijakan itu pada intinya agar tidak membelenggu bagi investor dan masyarakat. Kami juga telah memetakan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang membuka seluas-luasnya bagi para investor," kata Imron.

Menurutnya, secara geografis Kabupaten Cirebon terletak di wilayah yang strategis untuk berinvestasi. "Kabupaten kita, letaknya di tengah-tengah yang dapat ditempuh melalui jalur apapun. Kita punya tol, kereta, pelabuhan juga dekat dengan

bandara. Ini tentu merupakan potensi yang positif," ujar Imron.

Dia meyakini, harapan Kabupaten Cirebon ramah investasi akan tercapai selama semua elemen bersatu. Imron menargetkan pada 2023 nanti, Kabupaten Cirebon baru akan memiliki kawasan industri. Pasalnya ia harus menyiapkan infrastruktur terlebih dahulu selama 3 tahun kedepan.

"Kita ingin Kabupaten Cirebon bisa menjadi bagian dari rencana pembangunan strategis nasional. Kalau sekarang belum dilirik karena masih banyak halangan," terangnya.

Oleh karena itu, Imron juga berharap, masyarakat dapat membuka diri terhadap program yang dicanangkan Pemkab Cirebon ini. "Saya yakin jika semuanya saling bersinergi maka akan sukses mencapai harapan 2023 nanti. Kabupaten Cirebon bisa menjadi



wilayah industri," tegasnya.

Penyempurnaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi juga mendukung penuh rencana eksekutif dalam pendirian kawasan industri ini. Namun ia mengingatkan perlunya penyempurnaan kebijakan pada peraturan daerah (perda) tentang RTRW terlebih dahulu.

Perlunya detail penyempurnaan RTRW, kata Luthfi, agar regulasi yang dibuat pemerintah bisa menjadi magnet investasi. "Kita tidak akan mampu mencapai itu, jika aturan yang ada tidak mendukung," terangnya.

Ia juga berharap, dalam proses pemetaan wilayah investasi, harus menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Cirebon.

"Kita punya pantai yang

panjang, dari Kapetakan sampai Losari. Saya berharap bupati punya desain soal itu. Kita ingin pastikan berbicara banyak dalam ruang perikanan. Bagaimana memfasilitasi terciptanya sektor investasi pada bidang kelautan dan pertanian," kata Luthfi.

Selain itu, tak kalah menarik adalah sektor pariwisata untuk mengubah wajah Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Luthfi berpendapat, jika sektor pariwisata akan mampu mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga pendapatan masyarakat Kabupaten Cirebon juga bisa meningkat.

Terakhir, adalah langkah akselerasi untuk mempercepat pertumbuhan investasi. "Setelah punya detail rencana pembangunan industri dan pemetaan investasi. Bahasa lainnya kita ngamen. Kita tawarkan Cirebon untuk para investor agar terta-

rik," tandas Luthfi.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Suhartono menerangkan, jika kesiapan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024. Rencananya dari total 10 ribu hektare lahan, ada 8 ribu yang akan direalisasikan sebagai kawasan industri.

"Sisanya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Sebagaimana aturan yang berlaku," ungkapnya.

Bappelitbangda juga telah membuat perencanaan untuk pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses menuju wilayah industri. Namun, sebelum itu, kata Suhartono, pentingnya Rencana Detail Tata Ruang wilayah (RDTR) sebagai turunan RTRW yang nantinya menjelaskan secara gamblang.

Sementara itu, untuk menindak para oknum yang menghambat tercapainya investasi, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon Suwanto SH MH berjanji, Kejari Kabupaten Cirebon selaku penegak hukum, akan terus memantau jalannya realisasi investasi apabila terjadinya pungli yang merugikan.

"Baik bagi ASN, oknum maupun masyarakat. Ada sanksi yang siap diterima pelaku dari sanksi pidana, umum maupun tindak pidana korupsi. Ada pasal 12 huruf E dan pasal 3 hukum pidana. Itu bisa kita pidanakan bagi oknum pungli," kata Suwanto.

Suwanto juga membuka lebar, bagi siapapun yang menemui oknum yang melakukan pungli maupun hambatan lainnya. "Laporkan kami untuk ditindak. Baik dikenakan pidana umum atau pidana korupsi," katanya. •Suf

Forkopimda Kabupaten Cirebon: Siap Selesaikan Hambatan Investasi

Forkopimda Kabupaten Cirebon menyatakan kesiapannya mengawal hambatan investasi yang dicanangkan oleh Bupati Cirebon. Apa langkahnya?



Kapolresta Cirebon Arif Budiman, menyatakan dukungan penuhnya terhadap percepatan investasi dan pembentukan kawasan industri yang diinisiasi Pemkab Cirebon. Ia pun menegaskan akan mengerahkan jajarannya dalam mengawal setiap investasi yang masuk ke daerah.

"Saya sepakat dengan Pak Bupati, Ketua DPRD maupun Dandim Kabupaten Cirebon dalam pembentukan Satgas ini. Yang tujuannya agar ekonomi Cirebon bisa berkembang lebih baik lagi," tegasnya dalam Seminar Saber Investasi yang diselenggarakan Forkopimda Kabupaten Cirebon, Juli 2021 lalu.

Arif berkomitmen melakukan pendampingan dan pengawalan secara ketat, untuk memastikan investasi berjalan dengan baik, benar, tepat sasaran dan akuntabel. Namun ia berpendapat program percepatan ekonomi ini tak bisa dijalankan sendiri. Diperlukan kerja sama antara seluruh stakeholder yang ada di Kabupa-

ten Cirebon. Terutama mengenai kondusifitas keamanan.

“Kita perlu menyatukan visi yang sama jika ingin program investasi ini berjalan dengan lancar. Mulai dari proses persiapan, proses konstruksi, produksi hingga pengembangan. Semua itu butuh jaminan keamanan,” jelasnya.

Apalagi tak dipungkiri, jika saat ini masih banyak persoalan sosial di lapangan yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Untuk itu, menurutnya, perlunya kesamaan visi antar seluruh *stakeholder* agar program investasi yang tengah dibangun dapat diterima masyarakat.

Ia pun berharap, pentingnya meluruskan persepsi investasi. Tujuannya agar manfaat dari investasi mampu membangun sebuah revolusi kemakmuran dan sifat kooperatif masyarakat. Peralunya, kata Arif, masyarakat yang kondusif akan mampu menciptakan daya tarik bagi investor dalam merealisasikan investasinya.

“Kalau kemudian seluruh komponen yang ada di Kabupaten Cirebon memiliki visi yang sama dalam menerapkan program investasi ini, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam menarik investasi. *Outputnya* harus kita samakan, yakni agar tingkat kemakmuran masyarakat dapat lebih sejahtera dari hari ini,” kata Arif.

Komitmen Mengawal Pertahanan Darat

Senada dengan itu, Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon Letnan Kolonel Inf Sugir juga turut mendukung penuh, adanya program percepatan investasi. Terlebih wacana



tersebut akan direalisasikan di wilayah timur Cirebon.

“Kami dari unsur TNI akan selalu mendukung. Terutama dari sisi pertahanan wilayah darat, diantaranya pola penataan ruang yang pastinya perlu keamanan,” jelasnya.

Sugir akan terus berupaya menjaga stabilitas di lapangan. Namun sebelum terlaksana, ia juga menekankan perihal perlunya komitmen bersama, guna memitigasi persoalan yang akan terjadi kedepan.

Menurutnya, wilayah yang diubah menjadi kawasan industri, tentu akan mengorbankan satu bidang lainnya. Misalnya,

kata Sugir, kehilangan lahan pertanian bagi masyarakat petani.

“Yang perlu kita pikirkan adalah solusi untuk itu, agar bisa saling bekerjasama dari satu bidang ke bidang yang lain,” tuturnya.

Apalagi hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hajat hidup masyarakat, sehingga pentingnya pemahaman yang sama dalam memaknai kawasan industri agar tak memunculkan permasalahan sosial.

Meski begitu, Sugir sangat sepakat rencana menciptakan kabupaten yang ramah investor dan mampu menjawab kebutuhan. Ia pun berharap rencana



kawasan industri sedikit demi sedikit akan mampu mengikis permasalahan sosial.

“Kami akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang ramah investor serta bisa dijadikan sarana untuk keberlangsungan hajat hidup masyarakat. Kita juga berharap dampak dari ini, masyarakat bisa mendapatkan hidup yang tenang tanpa ada rasa kekhawatiran dan ancaman karena kehadiran industri,” tandas Sugir.

Sanksi Bagi Penghambat Investasi

Sebagaimana surat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon Suwanto, SH MH mengatakan, kejaksaan memiliki peran untuk membantu agar percepatan investasi dapat berjalan.

Untuk itu, kata Suwanto,

Kejari Kabupaten Cirebon berwenang untuk menindak jika selama proses investasi mengalami hambatan.

Menurutnya, kejaksaan memiliki tugas mengawal investasi, diantaranya menerima laporan dari pelaku dunia usaha jika terjadi hambatan selama berinvestasi. Baik hambatan perizinan, mendorong penyelesaian hambatan dengan berkoordinasi melalui lembaga dan pemerintah daerah serta mencegah pungutan liar (pungli) atau tindak pidana korupsi lainnya.

Ia pun berkomitmen terhadap tercapainya kepastian investasi sebagaimana yang telah dicanangkan bupati.

Suwanto merinci berbagai pelanggaran yang terjadi sejauh ini dalam proses investasi di Kabupaten Cirebon di antaranya: adanya pungutan liar (pungli), penolakan dari masyarakat maupun hambatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Karena di Kabupaten Cirebon itu sangat kompleks ada sekitar hampir 300 LSM yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga di sinilah kita sebagai pemerintah yang memiliki alat negara tak boleh takut. Kita punya aparat kepolisian dan TNI. Jika memang memungkinkan kita harus kerahkan,” jelas Suwanto.

Selain itu, Kejari Kabupaten Cirebon selaku penegak hukum akan terus memantau jalannya realisasi investasi apabila terjadinya pungli yang merugikan. Baik bagi ASN, oknum maupun masyarakat. Suwanto menjelaskan, telah ada sanksi yang siap diterima pelaku mulai sanksi pidana, sanksi umum maupun tindak pidana korupsi.

Suwanto menerangkan, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku pungli. Itu bisa kita pidanakan,” kata Suwanto.

Suwanto pun membuka lebar bagi siapapun yang menemui oknum yang melakukan pungli maupun hambatan lainnya. “Laporkan kami untuk ditindak. Baik dikenakan pidanan umum atau pidana korupsi,” tegasnya.

Pasalnya, Suwanto menilai, faktor hambatan tertinggi saat ini adalah praktik pungli oleh pihak tertentu maupun masyarakat yang memiliki kaitan dalam proses investasi. Sehingga investor pun takut dan memilih lari ke wilayah lain karena bisa membebani usaha.

“Kita komitmen menyelesaikan pungli itu, untuk mendukung langkah pemerintah daerah agar investasi di Kabupaten Cirebon bisa berjalan dengan baik dan tidak lari ke daerah lain,” tandas Suwanto.

•Lan/Suf

Direktur Eksekutif HKI Fahmi Shahab: Cirebon Memenuhi Syarat Kawasan Industri 4.0

Pergeseran kawasan industri saat ini, menuntut penggunaan *smart logistik* dan *devices*. Selain itu ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang memadai. Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon?



Jelang Kabupaten Cirebon akan menjadi kawasan industri pada 2023 nanti, Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Fahmi Shahab, mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, pengembangan dan pembangunan kawasan industri telah sesuai sebagaimana salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Fahmi menjelaskan, manfaat berinvestasi bagi para investor di kawasan industri pertama, memberikan kepastian peruntu-

kan lokasi sesuai tata ruang dan kepemilikan lahan.

"Jika dulunya kawasan industri tidak memikirkan lingkungan, sekarang sisi lingkungan sangat diprioritaskan. Dari 100 persen kavling industri, hanya 60-70 persen dipakai. Sisanya untuk ruang terbuka hijau. Ini membuktikan jika kawasan industri sekarang lebih mengedepankan dampak lingkungan dan fasilitas pengelolaan lingkungan" jelasnya.

Selain itu, kata Fahmi, manfaat berinvestasi di dalam kawasan industri akan mendapatkan kavling industri sesuai

kebutuhan dengan kepastian kepemilikan menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berlaku.

"Jadi di sini kepastian hukum sudah ada, karena kawasan industri dibangun sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku di kabupaten dan kota," terangnya.

Selanjutnya, manfaat ketersediaan infrastruktur, utilitas, dan fasilitas yang terintegrasi, fasilitas kajian analisis manfaat dan dampak lingkungan (Amdal), persetujuan bangunan gedung yang diproses melalui pengelola



kawasan, kemudahan perizinan yang diproses secara paralel, peluang mendapatkan insentif daerah dan fasilitas perpajakan. Terakhir manfaat penetapan sebagai objek vital nasional.

Sementara ini, arah pengembangan kawasan industri di Jawa harus berbasis teknologi tinggi, padat karya, berbasis hilir dan memiliki prinsip berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/2016 diantaranya: tersedianya pembangkit listrik, instalasi pengolahan air bersih dan air limbah, jaringan gas industri, dekat pelabuhan, jaringan telekomunikasi serta kedekatan dengan bandara dan ja-

lur kereta api barang.

"Saya pikir Kabupaten Cirebon telah memiliki infrastruktur dan utilitas yang dibutuhkan kawasan industri yang berguna mengirim logistik nantinya," kata Fahmi.

Selain itu, kawasan industri harus menyesuaikan dengan pembangunan kawasan industri berdasarkan RTRW kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

"Kesesuaian tata ruang merupakan prasyarat bagi perizinan kawasan industri. Dan Kabupaten Cirebon termasuk salah satu yang memenuhi syarat," terangnya.

Namun sebelum itu, kata Fahmi, diperlukan langkah-langkah yang harus ditempuh, yakni keberadaannya di dalam RTRW, menentukan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID), membentuk entitas pengembangan dan manajemen kawasan ekonomi, kemampuan manajemen kawasan industri untuk menarik investor.

Selanjutnya menyediakan infrastruktur dan utilitas pendukung, pengelolaan AMDAL, pengembangan SDM melalui sekolah kejuruan dan pemberdayaan juga harmonisasi hubungan dengan masyarakat.

Ia pun menilai, jika Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang strategis karena memiliki akses dan aset. "Tinggal melihat sejauh mana sedimen dan kemampuan tanahnya. Kami dari HKI siap membantu melakukan kajian dan riset," paparnya.

Konsep pengembangan kawasan industri generasi saat ini memasuki modern yang mengintegrasikan dengan potensi daerah dan akan berbasis industri 4.0. Yakni penerapan *smart logistic system* memadukan antara penerapan logistik (IT bases) dan penggunaan *smart devices* dalam mengontrol lalu lintas barang.

Sehingga, untuk mencapai itu, perlu infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung konsep ini. Setidaknya tersedianya akses untuk sistem logistik, ketersediaan listrik yang handal hingga ketersediaan jaringan *fiber optic* yang terhubung langsung ke *warehouse*.

"Kalau kita lihat Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang luarbiasa untuk mengembangkan menjadi kawasan industri namun perlu kajian mendalam mengenai apa saja yang menjadi peluang investasi untuk Kabupaten Cirebon," tandas Fahmi.

Waka Satgas Investasi: Cirebon, Pertama Bentuk Satgas Investasi

Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi Setia Untung Ari Mulyadi mengapresiasi langkah positif Kabupaten Cirebon bentuk satgas investasi. Mengapa?



Tepatnya pertengahan Juli 2021, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon menghadiri kegiatan seminar bertajuk ‘Saber Investasi Sebagai Penggerak Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Cirebon’. Mereka mendiskusikan, sejauh mana kesiapan dan kebutuhan Kabupaten Cirebon dalam rencananya menjadi kawasan industri.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi dalam sambutannya mengucapkan, banyak terimakasih dan

merasa sangat bangga kepada seluruh jajaran Forkopimda, SKPD dan masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersama-sama berkeinginan melakukan perubahan. Langkah kecilnya dengan membahas kesiapan Kabupaten Cirebon membuka kran investasi.

Imron menerangkan, pandemi Covid-19 telah membuat seluruh sektor kehidupan terdampak, tak terkecuali ekonomi. Namun ia mengatakan hal ini tak harus membuat semangat luntur dan terlenta. Ia meyakini

Kabupaten Cirebon akan dapat bangkit pada sektor ekonomi. Pasalnya Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten tertua yang memiliki letak geografis strategis.

“Bisa diuntungkan baik dari darat, laut dan udara. Karena kita semua punya,” ujarnya.

Oleh karena itu Imron telah membentuk satgas percepatan investasi untuk mewujudkannya. Mereka bertugas untuk menyelesaikan seluruh hambatan investasi di Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi Nasional Setia Untung Ari Mulyadi, yang hadir mengisi arahan pun menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah mengagas seminar ini.

“Saya menyambut baik seminar investasi pertama pada 2021 ini. Saya patut bangga karena untuk pertama kalinya juga Cirebon adalah Kabupaten yang pertama membentuk satgas percepatan investasi ini,” katanya.

Ari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi Nasional mengatakan, kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pasalnya kondisi perekonomian di Indonesia tengah resesi.

Sebagaimana tercatat World Bank, peringkat Indonesia kembali menempati kategori negara berpenghasilan rendah sejak 1 Juli 2021. Sehingga salah satu upayanya perlu dilakukan kembali geliat investasi untuk menumbuhkan perekonomian.

“Harapan seminar investasi ini, dapat memberikan hal positif dalam perubahan struktur ekonomi serta mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Cirebon nantinya,” pungkas Ari, yang juga menjabat Wakil Kejagung RI. •Suf

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Keluhan Praktik Judi dan Prostitusi Liar



Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati
Saya Wanda (bukan nama sebenarnya) (28) dari Palimanan. Saya ingin menyampaikan keresahan mengenai praktik perjudian yang terjadi di daerah tempat saya

tinggal. Saya merasa sedih sekaligus prihatin terhadap kondisi ini, bahkan ada dari kalangan pelajar yang turut serta bermain judi karna terpengaruh dengan lingkungannya.

Para warga dan tokoh masyarakat sebenarnya telah berupaya menertibkan praktik ini, namun selalu berakhir dengan kegaduhan. Alhasil, keresahan ini masih terus berlanjut.

Selain perjudian, masalah lainnya adalah praktik prostitusi ilegal yang hingga kini masih berlangsung bahkan saat pandemi Covid-19. Para PSK masih kerap menjajakan dirinya untuk pria hidung belang seperti yang terlihat di kawasan Pasar Minggu di Palimanan.

Saya tidak ingin Kabupaten Cirebon terutama Palimanan dicap buruk. Saya mengharapkan solusi terbaik dari Bapak/Ibu Dewan yang terhormat sekalian. Terimakasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

Wanda/Mahasiswa/Palimanan

Saran Penataan Lalin Pasar Celancang



Assalamualaikum Wr Wb

Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati. Saya Hidayat (23) warga Desa Kapetakan. Saya ingin menyampaikan sedikit saran, terkait kondisi lalu lintas di depan Pasar Celancang yang sering terlihat semrawut dan kadang menimbulkan kemacetan terutama saat jam pulang kerja.

Menurut saya, perlu penataan bagi para pedagang agar tidak menggunakan badan jalan untuk tempat lapak, demi kelancaran berlalu-lintas. Selain itu, perlu

juga penertiban kendaraan-kendaraan yang sengaja parkir di sisi kiri jalan dengan waktu yang cukup lama.

Sebagai tambahan, mungkin perlu juga fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk masyarakat agar lebih aman. Mengingat jalur ini adalah jalur Provinsi sehingga banyak jenis kendaraan yang melewati jalur ini setiap hari. Terimakasih Wassalamu'alaikum Wr Wb.

(Hidayat/Karyawan/Kapetakan)

Mahalnya Izin Produksi Garam



Salam hormat Bapak/Ibu DPRD. Perkenalkan saya Sigit Prayitno, pelaku usaha garam dari Desa Rawaurip, Pangenan. Saya ingin menyampaikan keluhan mengenai besarnya ongkos perizinan produksi garam. Selain itu, proses waktu terbit perizinan pun dirasa begitu lama. Meskipun pada akhirnya saya telah melewati tahap perizinan tersebut. Kita ingin kedepan bisa lebih mudah dan lebih cepat.

Pasalnya, hal ini telah berdampak pada sebagian pelaku usaha garam yang lebih memilih tidak melangka-

pi izin usahanya. Dan berdampak pada ketidaksiharian dalam mengatur harga jual garam di pasaran. Hal ini tentu sangat merugikan bagi kami yang memiliki izin. Saya berharap hal ini dapat ditindaklanjuti oleh Bapak/Ibu dewan, agar kedepan dapat tercipta iklim usaha yang lebih sehat.

Jika berkenan Bapak/Ibu dewan bisa berkunjung langsung terimakasih.

(Sigit/Pengusaha/Rawahurip)

Warga Mengeluh Jembatan Penghubung



Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan keluhan mengenai kondisi jembatan alternatif penghubung Kelurahan Sumber dan Kelurahan Kemantren yang berada di Jalan Melati IV. Jembatan ini se-

benarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun begitu, banyak dari pengendara roda dua yang juga melewatinya.

Kami khawatir jika kondisinya dibiarkan terus-menerus seperti ini, nanti bisa timbul korban. Selama ini kami hanya bisa memperbaiki dengan material seadanya yang bersumber dari sumbangan warga yang lewat.

Selain perbaikan jembatan, kami juga memerlukan penerangan tambahan untuk warga yang melintas saat malam hari. Mengingat lokasi jembatan ini membelah rimbunnya pohon bambu, sehingga kondisinya nyaris gelap total pada malam hari.

Dengan penerangan yang maksimal, warga yang melintas akan lebih bisa berhati-hati. Kami berharap kepada Bapak/Ibu Dewan atau Pemerintah daerah agar dengan segera menindaklanjuti hal ini. Sekian dari saya, terimakasih.

.(Rukhoyah/Ibu Rumah Tangga/Sumber)

Perpustakaan Pedati Bayalangu Sempat Diundang ke Istana Presiden

Hampir tiap hari, Robi berkeliling membawa pedatinya dari satu tempat ke tempat lain untuk menjajahkan buku kepada masyarakat secara gratis. Bagaimana kisah pegiat literasi ini?



Keresahan melihat anak-anak di lingkungan sekitar terhadap dunia *gadget* sudah berlangsung lama. Belum lagi setelah mengetahui hasil survei UNESCO, salah satu lembaga survei internasional yang menganggap tingkat baca masyarakat Indonesia terendah kedua dari 62 negara.

Melihat itu, hati seorang laki-laki bernama Robi-anto memuncak. Robi, sapaan akrabnya, memang bukan orang berpendidikan tinggi. Ia hanya mampu menyelesaikan sekolah tingkat dasar, namun tekad dalam menggaungkan literasi benar-benar besar. Ia berkeinginan menepis stigma tingkat literasi warga Indonesia yang rendah.

Pasalnya, lelaki bertubuh tegap yang berasal dari Desa Bayalangu, Kecamatan Gegek ini merupakan seorang pecinta buku sejak kecil. Puncaknya, ia lakukan sepulang menjadi TKI di Malaysia. Robi pulang dengan membawa harapan dan impian un-

tuk mengubah desanya sendiri.

"Tahun 2011 saya bekerja di Malaysia sampai 2013 kemudian menikah. Saat itu saya masih ngikut teman berkeliling mencari relasi selama 2 bulan. Sampai di rumah saya berpikir dan memutuskan untuk bergerak menggaungkan literasi di desa. Saya meminta izin terlebih dahulu kepada istri yang waktu itu masih menjadi TKW. Alhamdulillah istri mendukung," terangnya.

Dengan bermodalkan tas gendong yang berisi 30 buku, Robi mulai berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Menjajahkan bukunya demi mengenalkannya kepada masyarakat.

Alih-alih diapresiasi oleh masyarakat, Robi justru mendapat banyak cercaan dan hinaan selama di perjalanan pada fase awal. Namun ia tetap teguh dengan pendiriannya. Ia mulai banyak mengambil pelajaran selama di perjalanan.



"Jika diprosentase, 99 persen masyarakat memandang negatif. Dari mulai buku dilempar. Ada juga yang ngomong itu kerjaan orang pengangguran. Yang terparah, ada sebagian masyarakat yang menilai kalau membaca tak akan membuat kita menjadi kaya," kenangnya.

Tak sebentar, kurang lebih 6 bulan lamanya Robi kenyang akan kritik dan hinaan. Namun sekali lagi, ia tak berhenti melakukan langkah sucinya. "Saya mulai belajar untuk bersabar dan ngaji rasa. Apakah memang begini risiko melakukan perubahan?" tanya hatinya kala itu.

Semangat Robi tak patang arang. Hingga Robi pun mulai memanfaatkan media sosial untuk membagikan kegiatan positifnya kepada khalayak. Berlawanan dengan apa yang ia dapatkan dalam kehidupan nya-

ta. Di media sosial, Robi justru menuai banyak pujian dan apresiasi dari berbagai daerah atas perjuangannya menjadi pegiat literasi.

Melalui media pula, Robi mulai berkenalan dengan Nirwan Arsuka, seorang pencetus dan founder *Pustaka Bergerak*. Nirwan merupakan sarjanawan nuklir UGM yang juga pustakawan. Saat itu, Robi mendapatkan kiriman buku darinya. Robi pun bertambah semangat untuk berkeliling kembali menjajahkan buku ke pelosok desa.

Alhasil buku yang dimiliki Robi sedikit-demi sedikit, semakin bertambah. Ia pun berkeinginan mempunyai kendaraan untuk mengangkut buku-bukunya. Saat itu Robi mendapat inspirasi setelah menonton acara televisi yang menayangkan pedati pustaka dengan menggunakan ker-

bau sebagai kendaraannya.

Singkat cerita, kawan Nirwan yang juga pegiat literasi bernama Nursam, pendiri *Ombak Pustaka* menghubungi Robi. Pak Nursam merasa tersentuh mendengar cerita pergerakan Robi dalam membangun dunia literasi di Cirebon.

"Akhirnya saat itu saya di kabari Pak Nursam untuk mencari motor yang murah, saya langsung mencarinya. Awalnya saya bertanya untuk apa? Karena saya tidak terbiasa dengan hal semacam itu. Ternyata saya dibelikan motor bekas seharga Rp 4 juta," jelasnya.

Selang beberapa waktu, pergerakan Robi ternyata disambut berbagai komunitas yang berasal dari desa-desa di Kabupaten Cirebon. Mereka berkeinginan belajar kepada Robi. Tentu Robi pun membuka pintu lebar kepada siapapun yang ingin belajar, asal mereka memiliki jiwa totalitas tinggi serta tekad yang kuat.

"Ada sekitar 49 desa yang ikut belajar dengan saya, padahal saya tidak pernah merekrutnya. Namun jika ada yang ingin belajar, saya selalu menanamkan pemahaman kalau bergelut di bidang literasi harus ikhlas tanpa harus mengharapkan apapun," ucapnya.

Pada tahun 2017 tepatnya di bulan Mei, saat ia tengah asik melapak di salah satu sekolah, gawainya selalu berdering. Ia sengaja tak menganggangkatnya. Robi orang yang tak biasa mengangangkat panggilan masuk dengan nomor baru.

"Saat itu saya memang memang tidak tahu, kalau nomor baru tersebut berasal dari staf kepresidenan. Singkat cerita saya diundang oleh istana untuk menghadiri acara *Hardiknas* bersama Presiden Jokowi dan Najwa Shihab," tandasnya. •Lan

76TH
INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

Memori Kemerdekaan



Vania, perempuan kecil tengah merajuk kepada sang ibu. Ia merengek, agar bisa mengikuti lomba kemerdekaan Indonesia layaknya dua tahun lalu.



Namun, situasi sekarang mengharuskan semua orang tak boleh berkerumun. Pandemi belum usai. Tak ada perlombaan yang digelar sebagaimana harapan Vania.



DIRGAHAYU
INDONESIA



Vania pun tak kehabisan akal, ia meminta kakak perempuannya merayakan kemerdekaan Indonesia berdua.



Kakaknya mengamini. Mereka mengawalnya dengan merangkai dan memasang bendera merah putih. Tak ketinggalan, lomba balap karung yang diidamkan Vania pun dilakoni.



Mereka tampak asyik memuliakan kemerdekaan meski dengan cara sederhana.

Memori baik Vania, tentang peringatan kemerdekaan pun tetap terjaga. Ia masih bisa terinspirasi untuk menghormati dan menghargai makna kemerdekaan. •Soy

foto-foto : Qusoy/dk

Pandi, SE Jadi Pemimpin Berbagai Lembaga

Sosok satu ini hidup dalam kesederhanaan sejak belia. Sementara masa mudanya ia selalu dipercaya menjadi pimpinan dalam berbagai lembaga dan organisasi. Bagaimana kisahnya?

Sekitar tahun 1975, di Desa Mayung ada seorang tengkulak es yang datang dari kota menawarkan pekerjaan sampingan kepada anak-anak. Kala itu, tawaran semacam ini merupakan hal menarik. Di samping bisa menambah uang jajan, para anak-anak terbiasa dididik agar tak membebani orang tua.

Salah satunya adalah Pandi, seorang siswa di SD Mayung, Gunungjati, yang tinggal di pelosok desa. Sebelum pergi sekolah, setiap hari, Pandi kecil harus bangun di pagi buta untuk menyiapkan barang dagangannya. Pandi menjual es plastik hingga tebu yang telah dikupas dan dipotong-potong untuk ia jajakan.

“Banyak sekali pengalaman dari kecil sampai se-



karang, lika-liku perjalanan dari yang susah hingga senang sudah saya alami. Semenjak kelas 2 SD, saya berjualan dengan membawa termos ke sekolah untuk diajakan kepada teman-teman,” kenang Pandi.

Sejak kecil, Pandi adalah anak yang tangguh. Ia tak mengeluh jika harus bersusah-payah terlebih dahulu untuk mendapat uang saku. Kedua orangtuanya selalu mengingatkan Pandi, agar bisa belajar hidup mandiri. Pandi mengaku, jika sesuatu yang telah ia lewati telah menjadi pembelajaran hidup baginya.

Pandi tak pernah mengira jika besar nanti, justru ia akan menjadi politisi seperti saat ini. Pasalnya cita-cita semasa remajanya adalah menjadi tentara dan polisi. Tahun 1986, setelah lulus dari SMK 1 Cirebon, Pandi pernah mendaftarkan diri pada kedua instansi pengabdian negara itu.

“Tapi ternyata mungkin bukan takdir saya. Saya tidak diterima daftar polisi dan tentara. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja setelah diterima di perusahaan pestisida Mundu,” akunya.

Lelaki bertubuh tegap dengan peci hitam yang selalu menempel di kepala ini, merupakan pria kelahiran Desa Babadan, Gunungjati, Kabupaten Cirebon. Sejak usia muda, Pandi aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Pandi orang yang pandai bergaul serta memiliki jiwa pengayom. Maka tak aneh ia sering didapuk menjadi ketua dalam perkumpulan.

“Pertama saya ikut mengurus Posyandu di desa, sekaligus menjadi ketua karang taruna pada tahun 1987. Hingga saat bekerja di perusahaan pun saya menjadi ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), ketua GP Ansor tingkat kecamatan hingga ketua forum remaja masjid,” terangnya.

Pandi menilai, organisasi merupakan salah satu cara untuk belajar, menambah ilmu dan membangun relasi. Baginya, masa-masa itu merupakan suatu wadah untuk pengembangan dirinya.

Pria yang bergelar sarjana ekonomi dari STIE Cirebon pada 2012 ini, juga masih memimpin sebuah koperasi bernama Peramba Bulan yang ia dirikan pada 1996. Berbekal pengalamannya mengelola koperasi semasa bekerja di PT Alfa Abadi Pestisida, membuatnya dipercaya menjadi pemegang sejak 2001 hingga sekarang.

“Pada saat itu, saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi ketua karena pengalaman saya dalam menekuni koperasi. Bermodalkan aset senilai Rp 5 juta kala berdiri, alhamdulillah saat ini koperasi telah berkembang hingga memiliki aset mencapai Rp 25 miliar dan telah beranggotakan dua ribu,” tuturnya.

Sederet pengalaman dan prestasi memegang pucuk pimpinan dalam lembaga dan organisasi, membuat Pandi juga dipercaya masyarakat.

Para masyarakat desa Babadan saat itu banyak yang berharap memiliki anggota dewan yang berasal dari warga asli. Ia pun didorong untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada 2014 silam. Meski awalnya ia ragu karena tidak memiliki modal, tapi pada akhirnya Pandi berani setelah mengingat teguh ucapan orangtuanya “*sapa kang wekel, pasti nyekel*”.

“Saya memang sudah aktif di partai politik sejak tahun 1998, waktu itu saya terlibat di PPP tapi tidak menjadi anggota partai. Era reformasi barulah saya aktif di PKB dari mulai ranting hingga PAC. Dan tepatnya Pileg 2014, berkat dukungan masyarakat akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon selama 2 periode. Periode pertama di dapil 1 dan sekarang di dapil 4,” jelasnya.

Pandi menjadi satu-satunya calon yang saat itu mendapat restu oleh semua elemen dari mulai tokoh agama dan tokoh masyarakat di desanya.

“Saat itu dapil saya termasuk yang tertinggal soal infrastruktur. Dan sekarang setahun setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon, saya memperjuangkan pembangunan jembatan permanen di Desa Babadan yang awalnya rusak cukup parah. Saya merasa senang jika aspirasi dari masyarakat bisa terealisasi dan berhasil,” pungkasnya. •Lan

Diah Irwany Indriyati

Pandai Baca Peluang Jadi Pebisnis Ulung

Sosok perempuan satu ini hanya menduga jika kemahirannya membaca peluang usaha didapat dari mertuanya. Bagaimana kisahnya hingga menjadi legislator?



Pandai memanfaatkan peluang tampak layak disematkan Diah Irwany Indriyati. Bagaimana tidak? Perempuan yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Golkar adalah pebisnis ulung. Tak ayal, jika ia pun memiliki banyak usaha di berbagai bidang.

Perjalanannya menjadi seorang pebisnis dimulai setelah dipersunting seorang tentara pada 1989 silam. Diah bersama suami tinggal di asrama TNI Koramil Losarang, Indramayu.

Pada waktu itu, seorang TNI maupun polisi mendapatkan biaya pokok tambahan untuk makan berupa beras dari pemerintah. Hanya saja Diah tak pernah mengambil jatah suaminya. Padahal jika dilihat, gaji suaminya kala itu hanya pas untuk makan

sehari-hari. Hingga Diah pun berinisiatif menukarnya menjadi uang.

“Karena gaji yang pas-pasan, saya dan suami sepakat untuk mencari tambahan dari hasil penukaran beras-beras itu. Dengan modal yang tidak seberapa, saya memulainya dan alhamdulillah berpenghasilan,” kenang Diah.

Tak hanya itu, perempuan kelahiran Jakarta ini juga membuka peluang peningkatan ekonominya melalui wujud lain. Diah tak sungkan merekrut para penganggur di sekitar tempat tinggalnya untuk menjadi pengemudi ojek dengan memfasilitasi kendaraannya. Selain membantu mempekerjakan para penganggur, ia pun mendapat pemasukan tambahan dari setoran.



Namun, dua bisnis pemula itu harus berhenti di tengah jalan. Setelah empat tahun berjibaku menggeluti usahanya, Diah harus kembali ke tanah kelahiran suaminya di Cirebon. Mau tak mau, Diah pun memberikan usaha itu untuk orang terdekatnya.

“Saat itu suami saya mengajak kami pulang kampung ke Cirebon. Suami saya bilang ingin berbakti pada tanah kelahirannya. Karena itu kami pulang dan menyerahkan usaha kami ke orang yang sudah kami anggap seperti keluarga sendiri di sana,” tuturnya.

Setelah kembali ke Cirebon, Diah tak sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Di samping merawat suami dan anaknya, ia memilih untuk mengisi kejenuhannya dengan bergaul bersama warga sekitar. Ia pun terlibat aktif dalam organisasi perempuan Pemberdayaan Kesejahteraan Ke-

luarga (PKK) Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang.

Tak disangka, kedekatannya dengan masyarakat menjadi wasilah dirinya dipercaya menjadi kepala desa. Perempuan lulusan Administrasi Negara Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Cirebon ini menjabat Kuwu Belawa pada tahun 1999.

Pada tahun yang sama, Diah pun mengepakkan sayap dengan melabuhkan dirinya bergabung di Partai Golkar. Namun, perjalanan karir politiknya tak se-koyong-koyong berjalan lancar. Ia beberapa kali gagal saat mencalonkan diri pada pemilihan legislatif.

“Saya jadi Kuwu Belawa 8 tahun. Dan pernah nyaleg di tahun 2004, karena peraturan saat itu masih boleh rangkap, tetapi saya gagal. Nyaleg lagi di tahun 2009 gagal juga, setelah itu saya memutuskan untuk kembali ke

desa,” ungkap Diah.

Meski memasuki percaturan politik membuatnya sempat pindah haluan dari dunia bisnis, tetapi jiwa pengusaha Diah tetap membara. Saat kembali ke desa, Diah lebih memilih mengaktifkan diri dalam organisasi binaannya semasa menjadi kepala desa yaitu Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTTRI). Organisasi tersebut bertujuan menopang perekonomian para petani di Desa Belawa.

Diah pun mendapat banyak masukan dari teman-teman APTTRI. Salah satunya untuk menyewa tanah bengkok milik desa seluas lima hektar sebagai ladang bertani dan menanam pohon tebu. Tak tanggung-tanggung Diah pun terjun langsung mengolahnya.

“Dari cara pengolahan tebu itu Alhamdulillah kami bisa dapat hasil penjualannya. Baik untuk kebutuhan kita maupun kita bagikan ke warga. Kita juga berhasil memproduksi beras dengan profit puluhan juta,” kata Diah.

Hingga tepatnya Pileg 2019, keinginan masyarakat untuk menampilkan dewan perempuan pun semakin kencang. Diah pun tak patah arang mencalonkan kembali hingga berhasil mendapatkan kursi.

Meski begitu, disamping kesibukannya menjadi wakil rakyat, Diah tetap melakoni jati dirinya sebagai seorang petani dan pengusaha.

“Jiwa bisnis saya tidak pernah hilang, mungkin turunan dari ibu mertua untuk selalu menatap dan menelaah berbagai peluang bisnis secara tanggap dan respek. Sekarang pun saya tetap menggeluti usaha, diantaranya pengolahan tebu dan toko bangunan” pungkas Diah. •Sar

Komisi I Fasilitasi Sangketa Kepemilikan Lahan Desa Astana

Pemdes Astana mengaku lahan parkir Makam Sunan Gunung Jati merupakan tanah bengkok milik desa. Namun ada sangketa kepemilikan? Seperti apa



Aset desa merupakan unsur penting dalam mendukung ekonomi pemerintahan desa. Pengelolaan aset desa yang baik akan berdampak bagi kemajuan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon mendapatkan laporan sangketa kepemilikan lahan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Astana, Gunungjati.

Pelaksana Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon Iis Iskandar, mengatakan, aset yang ada di Desa Astana sebenarnya cukup potensial. Salah satunya, tanah yang ditempati sebagai lahan parkir di makam Sunan Gunung Jati. Namun kata dia,

hingga kini keberadaannya masih menuai persoalan.

“Desa ini sangat istimewa karena asetnya sangat menjanjikan. Namun saya juga turut sedih karena saya mendapatkan laporan di lapangan banyak yang mengklaim tanah itu dan saling menguasai,” ujarnya.

Kuwu Desa Astana Nuril Anwar menerangkan, jika lahan parkir di wisata religi makam Sunan Gunung Jati belum dapat dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) Astana. Pasalnya hingga kini belum ada kejelasan mengenai status kepemilikan lahannya.

Nuril pun mengklaim, lahan tersebut awalnya milik Pemdes Astana. Bahkan, kata dia,

pada tahun 2015 sampai 2017 lalu, pemdes masih mengelola parkir tersebut bekerjasama dengan Disbudparpora Kabupaten Cirebon.

“Biaya parkir pada awal itu bermacam-macam. Untuk jenis bus Rp 52.500, yang dibagi pengelola 50 orang dengan ongkos persatu orang, seribu rupiah. Namun karena di lapangan justru tak beraturan, kita pun berinisiatif membuat keputusan bersama dengan mengatur biaya karcis bus senilai Rp 22.500 per satu bis,” ungkapnya.

Namun seiring waktu, ada pihak tentara yang mewakili Koramil Gunungjati mengaku memiliki hak atas lahan tersebut. Yang berakibat lahan parkir pun hanya



dikelola Disbudpora sejak saat itu. Anwar pun sangat menyayangkan atas persoalan tersebut.

Padahal, lanjut Anwar, jika sawah yang ada di depan makam Sunan Gunungjati itu merupakan tanah bengkok Desa Astana. Setelah adanya pengembangan makam, Disbudparpora Kabupaten Cirebon pun membangun lahan parkir. Namun tidak menggunakan uang desa, karena alasan tanah bukan milik negara.

Akibatnya, Pemdes Astana mengaku tak mendapatkan pemasukan PAD kembali. Pasalnya tanah bengkok sudah tak tersedia lagi selain lahan yang dijadikan parkir tersebut.

“Saat ini pemerintah desa hanya bisa menerima keadaan tersebut. Apalagi sekarang ada pembangunan di lahan tersebut melalui Yayasan Unswagati dengan dana Rp 10 miliar. Saya menyayangkan mengenai pembangunan di atas lahan tersebut, karena kami tidak mendapat informasi apa-apa,” ungkap Anwar.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany pun meminta agar pemdes dapat menginventarisasi terlebih dahulu tanah milik Pemdes Astana. Pasalnya Diah berpendapat, jika aset desa bermacam-macam tidak hanya jenis bengkok saja.

“Tapi kalau memang kondisinya demikian, bisa dengan bentuk satgas yang dianggarkan dari dana desa untuk mengembalikan hak-hak desa dan penataan ulang. Pemdes juga harus mencari data kepemilikan tanah jika benar, karena itu sebagai landasan utama,” terangnya.

Senada dengan itu, Hasan Batori, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon juga meminta, Pemdes Astana dapat menyampaikan jumlah seluruh aset milik desa. Pasalnya, jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) pemdes, diharuskan transparan.

“Kalau tadi kan, desa hanya menyampaikan aset dari tanah bengkok saja. Harusnya beberapa aset seperti tanah sikep, titorisara, pusaka juga disampaikan. Agar kami dapat mengetahui mana saja aset yang dimiliki oleh Desa Astana,” jelas Hasan.

Sementara mengenai konflik kepemilikan tanah bengkok, kata Hasan, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon siap memfasilitasi untuk menyelesaikannya. Apalagi menurutnya, aset yang dimiliki desa itu sangat berpotensi menghasilkan PAD dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, perlunya melakukan proses *judicial review* oleh Pemda Kabupaten Cirebon dan Pemdes Astana untuk mengajukan proses keberatan kepemilikan tanah yang diakuisisi oleh pihak Koramil Gunungjati.

“Caranya sepakat dengan Bu Diah, buat tim baik dari BPD untuk mendata aset yang dimiliki desa. Itu bisa dianggarkan melalui dana desa. Intinya kita ingin mendorong penataan atau melegalisasikan tanah desa agar tidak sampai dikuasai orang lain,” katanya. •**Lan**

Komisi III Ingatkan PT Longrich Lapor Rutin

Selama semester 2 tahun 2021, DLH melaporkan PT Longrich belum memberi laporan perizinan. Komisi III ingatkan PT Longrich harus lapor rutin tiap semester.



Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon pun mengunjungi PT Longrich yang bertempat di Desa Sidaremi, Kecamatan Pabedilan. Pabrik sepatu ini telah mulai beroperasi sejak triwulan pertama 2021. Saat ini perusahaan juga sudah menyerap ratusan tenaga kerja yang tengah berlatih memproduksi, sekalipun konstruksi bangunan belum semuanya beres.

Kunjungan kali ini, Komisi III ingin mengetahui secara langsung proses pembangunan PT Longrich baik menyangkut izin analisis manfaat dampak lingkungan (AMDAL) maupun faktor penunjang keselamatan,

seperti sarana pemadam kebakaran dan lainnya.

Hadir pula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan General Manager (GM) PT Longrich.

Dalam kunjungan, Komisi III belum dapat mengaudit total dikarenakan konstruksi yang belum rampung. Meski demikian, PT Longrich dinilai menyimpan catatan dan persoalan.

Kepala Bidang Pemulihan Dampak Lingkungan (P2DL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Yuyu mengatakan, ada sejumlah dokumen yang belum diserahkan PT Lon-

grich ke DLH. Hal tersebut karena hingga memasuki semester 2 tahun 2021, PT Longrich belum pernah melapor.

"PT longrich selama dua semester belum melaksanakan laporan. Sehingga saya belum tahu sudah sampai mana tahapan pembangunan ini," ujarnya.

Setelah mendengarkan pernyataan Yuyu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto menanggapi, jika itu benar maka PT Longrich telah melanggar aturan. Untuk itu ia meminta agar persoalan tersebut bisa segera diperhatikan oleh perusahaan.

"Setiap enam bulan sekali, PT Longrich diharuskan melapor-



kan ke pemerintah daerah. Mulai dari soal pelaksanaan AMDAL maupun keselamatan kerja perusahaan. Kalau sekarang sudah sejauh mana perkembangan pembangunan PT Longrich?" tanya Hermanto.

Menjawab itu, GM PT Longrich James mengaku, selama ini PT Longrich sebenarnya telah menjalankan AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Bahkan, kata dia, PT Longrich telah memperhatikan pekerja. Diantaranya pemberian upah yang lebih tinggi di atas Upah Minimum Regional (UMR) Ka-

bupaten Cirebon, jatah makan per hari, serta melakukan cek kesehatan.

"Sekitar 83 persen karyawan yang sudah masuk saja telah divaksin sejak awal Juli 2021 kemarin. Karena perusahaan ini masih baru. Karyawannya juga baru. Maka sekarang ini para karyawan sedang dibekali pelatihan memproduksi yang sesuai standar internasional," ungkapnya.

Selanjutnya, Hermanto juga menyinggung kesiapan sarana pemadam kebakaran yang telah memenuhi syarat. Kepala Dinas UPTD Damkar Kabupaten Cirebon Aab Subandi mengatakan, banyak kebutuhan sarana Dam-

kar yang harus dipenuhi PT Longrich hingga pembangunan selesai. Salah tiganya adalah alat pemadam api ringan (Apar), alarm hingga *hydrant*.

Menurutnya, sejauh ini baru terpasang 42 Apar di ruang gedung yang sudah siap digunakan untuk memproduksi. Jumlah tersebut dirasa telah cukup. Namun, kata Aab, hingga pembangunan selesai total yang dibutuhkan PT Longrich setidaknya sebanyak 64.

"Kurang 22 Apar lagi dari total kebutuhan secara keseluruhan. Jadi saya berharap kekurangan tersebut bisa terpenuhi ketika nanti pembangunan ini rampung," ujarnya.

Sementara kebutuhan alarm, menurut Aab, harus ada di setiap ruang gedung sebagai tanda pemberitahuan jika terjadi masalah maupun hal buruk lainnya.

Ketiga, Aab juga mengingatkan agar PT Longrich memiliki 152 *hydrant* atau bak penampung air. Sebarannya 108 *hydrant* terpasang di dalam kawasan pabrik dan 44 di area parkir.

"Akan kami cek nanti. Kalau hanya pentolannya yang terpasang dan tidak ada salurannya, akan saya bongkar lagi *hydrant*-nya. Jangan salahkan saya kalau ada kebakaran," tegasnya.

Aab juga mengaku, siap melatih para satpam PT Long Rich tentang cara menggunakan alat *hydrant*. Tujuannya agar bisa tanggap daruat bilamana terjadi kebakaran di kawasan tersebut.

"Mudah-mudahan tidak akan terjadi kebakaran hanya saja pencegahan harus segera kita upayakan. Sebab yang namanya kebakaran itu tidak ada yang tahu. Kalau kita mencegah setidaknya ada upaya yang akan kita lakukan jika sewaktu-waktu terjadi," pungkasnya. •Muiz

Prakarsai Perubahan Perda Sampah

Raperda perubahan pengelolaan sampah diharapkan menjawab kondisi sampah yang telah kronis di Kabupaten Cirebon. Mampukah?



Menindaklanjuti kondisi sampah di Kabupaten Cirebon yang dirasa telah kronis, DPRD Kabupaten Cirebon memprakarsai perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah pada rapat paripurna. Sebelumnya, rancangan tersebut, telah dibahas dan disepakati oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan tim raperda pemerintah daerah.

"Raperda pengelolaan sampah telah masuk ke dalam prioritas Propemperda Kabupaten Cirebon tahun 2021," jelas Mukhlisin Nalahuddin, ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon.

Mukhlisin menerangkan, latar belakang yang mendasarinya sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurutnya, pengelolaan sampah merupakan salah satu sub urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyelenggarakan pengolahan sampah secara sistematis terencana dan terpadu dari hulu ke hilir," terangnya.

Mukhlisin menilai, regulasi awal yang saat ini mengatur pengelolaan sampah telah usang. Penyebabnya akibat pertumbuhan aktifitas ekonomi dan

perilaku masyarakat yang telah mendatangkan implikasi baru. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap perda tersebut.

"Makanya, prakarsa pengolahan sampah ini, ingin secepatnya dibahas dan disepakati bersama dengan pemerintah daerah," kata Mukhlisin.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tciptaningsih, yang hadir saat rapat paripurna juga mengemukakan pentingnya perubahan perda. Ia mengatakan, persoalan sampah bukan hal yang mudah. Terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak besar pula pada tingkat konsumsi masyarakat. Akhirnya berpengaruh pula pada ketersediaan tempat



pembuangan akhir (TPA).

Oleh karenanya, Ayu menyarankan, beberapa pasal dalam raperda perubahan yang bersifat substansi teknis seperti persyaratan teknis TPA, akan ditindaklanjuti melalui peraturan bupati sebagai turunan nantinya.

Seperti diketahui, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki satu TPA yang berada di Desa Kepuh, Palimanan yang dijadikan tempat akhir pengangkutan sampah. Namun jumlah sampah yang tiap tahun terus meningkat, membuat TPA Kepuh diperkirakan hanya akan memiliki waktu pendek untuk dapat menampung kembali.

"Kita lihat saja, hampir *overload*. Daya tampungnya diperkirakan tersisa 1,5 tahun lagi," ujar Hermanto, ketua Komisi III DPRD Kabupaten

Cirebon, pada Januari lalu.

Selain TPA yang dikira-kira tak lagi berumur panjang, persoalan sampah lainnya ada pada proses pengangkutan sampah yang tak optimal. Penyebabnya, kata Hermanto, minimnya armada pengangkut sampah yang hanya berjumlah 40 milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sehingga sejauh ini, pengangkutan sampah sebenarnya belum semua dapat ditangani.

"Kalau 1 kecamatan 1 armada, apakah bisa mengangkut semuanya tidak? Sedangkan 1 kecamatan bisa mencakup 10 sampai 13 desa?" tanya Hermanto.

Maka tak heran, jika volume sampah yang dihasilkan dalam satu hari bisa mencapai 1.198 ton, kemampuan pengangkutannya hanya sanggup 100 ton per hari.

"Armada kita belum bisa

mengangkut sampah yang ada di seluruh TPS di Kabupaten Cirebon," ujar Hermanto.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, jika sampah saat ini adalah permasalahan bersama. Namun sejauh ini, ia mengaku telah menginstruksikan DLH agar menyeriusi penanganannya. Salah satunya, kata Imron, dengan rencana pengadaan dan pendirian TPA baru.

"DLH tengah melakukan pengadaan tanah untuk TPA yang rencananya akan ditempatkan di Karangwareng," jelasnya.

Setelah tanah yang direncanakan DLH sudah dapat berjalan, Imron pun berharap pengolahan sampah akan segera bisa ditangani. Imron beranggapan, faktor penting permasalahan sampah ini diantaranya mengenai TPA atau proses kelanjutan pasca pengangkutan. "Makanya saya mengintruksikan DLH harus secepatnya menangani sampah ini dengan sigap," papar Imron.

Selain itu, Imron juga mengaku, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menganjurkan seluruh kepala desa di Kabupaten Cirebon untuk mulai mengolah sampah-sampah yang masih di desa. Hal itu agar pengangkutan sampah oleh DLH dapat dimimalisasi.

"Jadi sejak sampah masih di desa, harus bisa diolah," jelasnya.

Ia pun mencontohkan beberapa desa yang telah melakukannya, seperti di Kecamatan Plumbon, Kecamatan Tengah Tani, dan Kecamatan Beber. Imron berjanji akan mengevaluasi desa-desa percontohan itu dan membantu pembiayaannya.

"Kita berharap pengolahan sampah yang telah dilakukan di desa-desa tersebut bisa menyeluruh juga ke desa yang lain," harapnya. •Soy

Komisi IV Pertimbangkan Relokasi SDN 1 Bendungan

Dinilai sudah tak layak sebagai tempat KBM, Komisi IV mendorong Gedung SDN 1 Bendungan bisa direlokasi. Namun harus ada upaya yang ditempuh terlebih dahulu. Apa saja?



Kondisi SDN 1 Bendungan yang berada di Desa Bendungan, Pangenan, menuai keprihatinan berbagai kalangan. Peralnya hampir setengah bangunan fisik mengalami kerusakan dan tak layak huni. Kepala SDN 1 Bendungan Evy Rosayanti mengaku, bangunan sekolah ini belum dilakukan rehabilitasi selama beberapa tahun.

Melihat itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina merasa prihatin. Ia mengatakan, meski di masa pandemi ini belum ada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka, tetapi seharusnya kondisi sekolah bukan seperti ini. "Ini memang tidak layak, pintunya bolong dan fasilitas

lainnya banyak yang rusak," ujarnya saat berkunjung.

Selain itu, kata Evi, lokasinya yang tak strategis di pinggir jalan utama pantura, membuat pihak sekolah harus melakukan pengawasan ekstra kepada para siswa.

Evy mengatakan, sepatutnya siswa mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan keamanan saat proses pembelajaran berlangsung. Ia pun meminta bangunan baru untuk menopang kegiatan sekolah sesuai dengan jumlah siswa dan mengusulkan relokasi.

Rencana relokasi SDN 1 Bendungan itu, sebelumnya telah diajukan kepada Dinas Pendidikan sejak tahun 2019 lalu. Prosesnya pun sudah tahap survei

ke tempat yang akan digunakan selanjutnya. Namun, karena pergantian pegawai dinas yang baru, alhasil belum mendapat tindak lanjut hingga sekarang.

Selain fisiknya yang tak layak, Gedung SDN 1 Bendungan belum memiliki fasilitas lapangan upacara dan sarana bermain siswa di luar gedung karena lahannya yang tak cukup.

"Sejujurnya kami prihatin, karena setiap kali ingin melaksanakan upacara bendera, kami memakai lahan milik warga. Itu pun kami harus berhati-hati dengan mobilitas jalan utama. Begitu juga ketika jam istirahat, para siswa berbaur dengan kondisi lalu lintas yang membuat kami tidak tenang," jelas Evi.



Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mengatakan, SDN 1 Bendungan memang harus secepatnya direlokasi, mengingat kondisinya yang bisa membahayakan para siswa. Namun sebelum itu, perlu perencanaan dan pertimbangan secara matang. Terutama mengenai anggaran dan status kepemilikan tanahnya.

"Setahu saya tanah sekolah ini milik desa. Misalnya sekolah ini dipindahkan, bekas bangunan ini rencananya untuk apa? Itu juga harus dimatangkan. Jangan sampai setelah sekolah pindah nanti ada masalah," ujar Aan.

Ia juga menjelaskan, jika sekolah yang berdiri memakai

tanah milik desa, biasanya terdapat biaya iuran. Yaitu berupa sewa tanah. Sebab, jika tak dilakukan, justru akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Senada dengan Aan, Kasi Sarpras SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Wanudin juga menerangkan, sebelum merelokasi bangunan sekolah, ada hal utama yang perlu diperhatikan. Yakni mengenai status kepemilikan tanah, agar tidak ada aduan kepemilikan secara tiba-tiba setelah bangunan sekolah yang baru sudah berdiri.

"Itu yang pertama, kejelasan status tanah terlebih dulu. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan setelahnya,"

terangnya menegaskan.

Sementara mengenai anggaran relokasinya, Wanudin memaparkan, Dinas Pendidikan memiliki tiga sumber dana yang berasal dari APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD 1 dan APBD 2. Namun, Wanudin menilai, APBN dan APBD 2 tidak memungkinkan untuk dialokasikan penambahan ruang kelas maupun relokasi bangunan.

"Kalau dari APBN atau DAK Kabupaten Cirebon sampai hari ini tidak ada slot untuk ruang kelas baru (RKB) karena dianggap sudah cukup. Kalau APBD 2 biasanya maksimal hanya menambah satu ruang kelas, tidak memungkinkan untuk murid di sini yang jumlahnya 304 siswa. Belum lagi ruang guru, toilet dan lapangan," paparnya.

Meski begitu, Wanudin mengatakan, masih bisa dianggarkan jika diusulkan dalam perubahan APBD 1. Oleh karena itu, ia merekomendasikan pihak SDN 1 Bendungan agar melobi pada perubahan tersebut untuk rencana relokasi.

Sementara mengenai status kepemilikan tanah, Sekretaris Desa Bendungan Umar, menegaskan jika status tanah SDN 1 Bendungan yang telah berdiri benar merupakan milik desa. Namun penggunaan itu bersifat hibah sehingga tak dipungut biaya sewa.

Umar pun mengaku, jika bangunan SDN 1 Bendungan jadi direlokasi, ia berencana akan mengubahnya sebagai tempat pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik desa.

"Kita akan memanfaatkan bangunan bekas itu menjadi sentra ekonomi untuk Desa Bendungan dan lab kajian keagamaan, pendidikan serta berbagai diskusi lain," pungkasnya. •Sar

Buah Naga Sedong Geliat Baru Agrowisata

Selain mangga gedong gincu, kini Kecamatan Sedong telah menyiapkan agrowisata hortikultura lain. Seperti apa?



Foto: www.freepik.com

Warga Kabupaten Cirebon mengenal daerah Sedong dengan wilayah yang memiliki komoditas pertanian dan perkebunan luas serta produktif. Selain mangga gedong gincu yang sudah mendunia, ada tanaman hortikultura buah naga yang tengah dikembangkan saat ini.

Hortikultura buah naga berada di bawah naungan Taman Teknologi Pertanian (TTP), yang bertekad menggeliatkan agrowisata di Kecamatan Sedong. Termasuk tanaman buah. Bidang kerja TTP meliputi pembenihan, pembibitan dan produksi tanaman melalui metode budidaya pertanian modern berbasis teknologi.

Awalnya, TTP yang berlokasi di Desa Windujaya ini, merupakan program dari Badan Litbang

Kementerian Pertanian Pusat yang didirikan pada 2016 dan dikelola Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jawa Barat. Namun, memasuki tahun 2019, TTP ini kemudian diserahkan kepada Pemda Kabupaten Cirebon.

“Program TTP ini, tersebar ke 16 wilayah di Indonesia. Provinsi Jabar ada di Garut, Bogor dan Cirebon. Tujuannya untuk tempat penyebaran teknologi pembenihan dan pembibitan budidaya tanaman. Kalau dulu di sini yang mengelola provinsi tapi sekarang oleh Pemda Cirebon,” terang Ading, koordinator pengelola TTP.

Setidaknya, terdapat empat sub sektor pertanian yang digarap oleh TTP ini. Salah satunya sektor hortikultura seperti mangga gedong gincu yang te-



lah dijadikan sebagai ikon Kecamatan Sedong. Saat ini, TTP juga tengah fokus menggarap jenis buah naga. Meski baru belajar berbuah pada tahun 2019, pengelola TTP optimis buah naga ini juga akan berkembang lainnya mangga gedong gincu.

Sekitar 300 pohon buah naga tumbuh di atas lahan TTP seluas tiga hektare. Terdapat dua jenis, yakni buah naga merah dan putih. Beberapa pohon buah naga dari TTP juga ditanam di lahan milik para warga desa setempat. Bahkan, telah tersebar hampir ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Sedong.

“Jadi TTP ini adalah pusatnya, bibit yang ditanam di TTP sendiri digunakan sebagai pohon induk penyebaran pengembangan ke daerah lain. Baik itu buah naga maupun lainnya,” jelas Ading.

Ading mengatakan, setiap pohon buah naga yang tumbuh di TTP bisa menghasilkan sebanyak 5 hingga 10 buah. Namun itu tergantung dari banyaknya batang pohon yang berkembang. Sementara hasil panennya, buah naga di TTP mampu mencapai 3 sampai 5 kwintal buah per tahun dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Baik soal rasa maupun fisiknya.

“Rasa buah naga di sini tentu berbeda dan lebih *fresh* karena begitu matang langsung dipetik bukan hasil peram. Rasanya perpaduan antara manis dan sedikit asam. Itu yang jenis merah, kalau yang jenis putih rasanya memang lebih asam. Tetapi kalau ukuran buahnya relatif sama dengan yang lain,” terangnya.

Selain menjadi agrowisata, TTP juga berencana menjadi pusat bisnis tanaman hortikultura yang hasil profitnya nanti akan digunakan untuk pengembangan. Oleh karena itu, pengelola TTP memutuskan untuk menjual satu buah naga seharga Rp 15 ribu jika memetik sendiri dari pohonnya langsung. Sementara Rp 13 ribu jika melalui *online*.

“Hasil profit bisa mencapai Rp 5 juta rupiah per tahun. Hasil itu, kami gunakan untuk membeli *polybag* serta beberapa media yang dibutuhkan. Selain itu, kami bagi lagi untuk biaya swadaya sembilan orang pekerja di sini,” tutur Ading.

Hanya saja, di tengah pengembangan agrowisata TTP ini, pengelola mendapati kendala persoalan air. Meski telah melakukan pengeboran sumur sedalam 120 meter, namun hingga saat ini air tak kunjung keluar. Sehingga menjadi salah satu penyebab masa panen buah naga hanya bisa satu kali saat musim hujan berlangsung.

“Persoalan air adalah masalah yang besar, karena yang namanya lahan pertanian dan perkebunan kan harus diairi. Kalau musim hujan kami masih bisa ambil dan menyedot dari Setu Sedong, tetapi kalau sudah memasuki musim kemarau itu kering gak ada airnya. Jadi kalau engga ada kita beli satu tanki Rp 200 ribu untuk keperluan yang mendesak,” ucap Ading. •Sar

Ciwaringin Ingin Dirikan Kampung Wisata Batik

Dengan semakin banyaknya orang yang berkunjung melihat pembuatan batik Ciwaringin. Pemdes Ciwaringin ingin dirikan kampung batik di salah satu blok. Seperti apa?



Zaenal Muttaqin (Sekdes Ciwaringin)

Batik merupakan warisan budaya nusantara. Hampir tiap daerah telah memiliki beragam jenis motif batik tersendiri. Salah satunya, batik Ciwaringin yang berasal dari Desa Ciwaringin di Kabupaten Cirebon. Desa ini, terdapat potensi wisata batik yang tak kalah menarik. Uniknya, warna batik Ciwaringin ini, menggunakan bahan dasar alami.

“Jadi perbedaannya dari bahan pewarna. Bahan alaminya dari mulai kayu-kayuan dan daun,” ungkap Sekretaris Desa Ciwaringin Zaenal Muttaqin.

Zaenal menerangkan, tujuan menggunakan pewarna alami itu, guna melestarikan alam yang berada di sekitar desa. Selain itu, penggunaan pewarna alami dapat menjaga warna batik lebih tahan lama dibandingkan dengan pewarna kimia.

“Pewarna dari bahan alami itu lah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi batik Ciwaringin,” jelasnya.

Selain itu, hal menarik lainnya adalah jenis motif dari batik Ciwaringin. Seperti Yusupan, Genopo, Gribigan, Pecutan, Ceker Ayam, Rajeg Wesi, Tebu

Sekeret dan Kapal Kandas. Motif-motif itu, memiliki latar belakang unik yang menyertainya.

“Kalau motif Genopo, sebenarnya itu singkatan dari bahasa Cirebon ‘*segane langka, tenaga lempo*’ (nasinya habis, tenaga habis),” ungkap Zaenal.

Maka tak aneh, batik tulis Ciwaringin ini telah menarik para wisatawan lokal hingga mancanegara. Zaenal bercerita, dirinya pernah mengantarkan empat turis asing yang berasal dari Korea dan wilayah Eropa.

“Para turis ini sengaja melancong ke Indonesia untuk mencari batik. Mulai dari Yogyakarta, Pekalongan hingga ke Desa Ciwaringin karena tertarik dengan proses pembuatannya,” tuturnya.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Desa (Pemdes) Ciwaringin, tengah membina para pengrajin batik Ciwaringin dengan menggaet PT Indocement yang berada di desa. Rencananya, Pemdes akan mendirikan kampung wisata batik yang ditempatkan di Blok Kebon Gedang RW 5 Desa Ciwaringin.

“Karena di satu blok itu, ada sekitar ratusan para pengrajin batik Ciwaringin yang sudah memproduksi di rumah masing-masing. Kita sudah MoU dengan CSR PT Indocement untuk pengembangannya,” kata Zaenal. •Soy

Matangaji Berharap Jadi Kawasan Religi

Beberapa situs peninggalan bersejarah ada di desa ini, Pemdes Matangaji inginkan jadi kawasan religi. Seperti apa?



Arif (Sekdes Matangaji)

Terletak di kaki Gunung Ciremai, Desa Matangaji, Sumber, Kabupaten Cirebon ternyata memiliki situs peninggalan sejarah. Di tengah luasnya perkebunan, terdapat petilasan Sultan Muhammad Sofiudin, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam babad kesultanan Cirebon.

Sultan Muhammad Sofiudin adalah salah satu orang yang gigih melawan pasukan penjajah Belanda kala itu. Tak heran ia pun menjadi orang yang paling diincar kolonialis. Demi menghindari kejaran penjajah, Sofiudin memutuskan membuat tempat meditasi untuk berlindung

ketika melintasi hutan.

“Konon, di sinilah tempat musyawarah beliau dan para pengikutnya saat terjadi perang gerilya dengan penjajah Belanda,” kata Arif, selaku sekdes Matangaji.

Arif menceritakan, asal mula nama Matangaji juga berasal dari julukan Sultan Muhammad Sofiudin yaitu Sultan Matangaji. Sebab, ia dikenal seorang yang ahli dalam membaca Al-Qur’an. Matangaji pun memupuk para pengikutnya di samping berlatih bela diri dengan mendaras..

“Selama berada di wilayah ini, Sultan Matangaji mendirikan beberapa bangunan. Diantara-

nya bernama buyut pande yang merupakan tempat pembuatan senjata dan sumur sipuh untuk mencuci senjata tersebut. Hingga kini keberadaannya masih tetap kami jaga,” ungkap Arif.

Saat ini, jejak peninggalan bernama Buyut Padaleman Petilasan Matangaji tersebut telah dijadikan sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, demi menjaga dan mengabadikan warisan leluhurnya, Pemdes Matangaji pun berencana membangun kawasan wisata religi.

Untuk mewujudkannya, pemerintah desa telah menggandeng para pemuda agar bersinergi bersama, menjaga petilasan Sultan Matangaji supaya tidak hilang. Mereka telah membangun sarana bagi para pelawat yang datang.

“Meski belum banyak peziarah, kami akan terus tingkatkan fasilitasnya, terutama infrastrukturnya. Kami juga akan libatkan tokoh agama, budaya dan sejarawan yang ada di desa untuk bersama-sama mengenalkan sejarah desa kami dan perjalanan Sultan Matangaji di sini,” tutur Arif.

Untuk itu, Arif berharap Pemkab Cirebon dapat memperhatikan potensi yang Desa Matangaji miliki. Supaya rencana menjadi desa wisata religi sebagaimana harapan pemdes dan warga setempat tercapai. •Sar

Gumulung Lebak

Fokus Kembangkan Usaha Digital Printing

Pemdes Gumulung Lebak optimis jika pendapatan asli desa akan tetap meningkat melalui usaha yang dikelola BUMDes Adipati Gelong. Bagaimana caranya?



Aan (Kuwu Desa Gumulung Lebak)

Dampak pandemi Covid-19 telah menghambat jalannya pembangunan desa termasuk peningkatan pendapatan bagi desa.

Namun berbeda dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Gumulung Lebak, Kecamatan Greded yang tak kehilangan akal. Mereka memutar otaknya dengan menghidupi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Adipati Gelong (AGE) agar ekonomi desa tetap berjalan.

Pemdes Gumulung Lebak pun

tidak main-main untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Saat ini BUMDes AGE memiliki usaha unit sablon digital printing yang telah berjalan sejak Juni 2021.

Tak kurang senilai Rp 80 juta dari anggaran dana desa yang direncanakan sejak 2020, Pemdes mengalokasikannya kepada pengelola BUMDes guna membeli kebutuhan peralatan unit usaha.

"Tahun ini senilai Rp 80 juta. Tahun depan akan kita alokasikan lagi, sesuai proposal yang diajukan pengelola BUMDes," jelas Aan,

Kepala Desa Gumulung Lebak.

Benar saja. Meski baru dua bulan berjalan, usaha sablon berjenama 'Adipati Gelong Printing' kini telah dikenal dan diminati banyak orang.

"Alhamdulillah selama sekitar 40 hari ini kita telah menyablon hingga habis 100 meter plastik pet film. Kita juga sudah bekerjasama dengan banyak sekolah dalam pembuatan seragam. Baik sekolah di wilayah desa kami ataupun desa lainnya," ujar Heru, selaku Kepala BUMDes Adipati Gelong.

Heru mengungkapkan, banyaknya pesanan tersebut, karena kualitas soblonnya yang berkualitas tinggi serta mudahnya proses pemesanan. Para pemesan, cukup mengirimkan gambar yang diinginkan dengan format aplikasi desain.

"Pembeli cukup kirim gambar CDR ke kami kemudian langsung dicetak. Kualitas sablon di BUMDes kami Digital Transfer Film (DTF). Sebenarnya jenis DTF bisa menggunakan alat setrika. Tetapi agar kualitasnya baik, kita gunakan alat mesin press," ungkapnya.

Heru pun optimistis, AG Printing yang dikelola BUMDes akan menyumbang banyak untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) di akhir tahun ini. Sehingga meskipun masa pandemi, misi meningkatkan perekonomian desanya bisa tercapai. •**Muiz**

Kempek

Olah Titisara Jadi Kedai dan Wisata

Dalam upaya meningkatkan PAD, Pemdes Kempek tengah sulap titisara jadi kedai dan wisata. Seperti apa?



Urip (Kuwu Kempek)

Sebagian warga Kabupaten Cirebon mengenal Desa Kempek, Gempol dengan desa santri. Palsanya terdapat banyak pesantren masyhur yang telah lama berdiri dan melahirkan ribuan generasi islami. Maka tak aneh jika desa ini sering dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan.

Meski begitu, sebenarnya setengah lebih mata pencaharian warga Desa Kempek adalah petani. Hamparan sawah tampak menghampar saat mulai memasuki desa. Pemandangan

begitu indah dengan latar desa perbukitan yang menjulang. Terlebih di ujung perbatasan antara Desa Kempek dan Ciwaringin, Pemdes Kempek memiliki lahan yang begitu menarik.

"Kita punya lahan di Tegal Pانونان yang lokasinya di perbatasan Ciwaringin. Luasnya 11 hektare. Rencananya, lahan tersebut akan dibangun wisata modern seperti di daerah pegunungan," ujar Urip, Kuwu Desa Kempek.

Sebelumnya, Urip mengaku, lahan tersebut yang menjadi

tanah titisara telah menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 115 juta per tahun. Penghasilan tersebut didapat dari pelelangan seluruh titisara yang dimiliki pemdes.

"Tanah yang akan dijadikan wisata di Tegal Pانونان itu menghasilkan pemasukan sekira Rp 20 juta per tahun, karena dirasa tanah tersebut tidak begitu produktif. Sisanya tanah sawah yang ada di pemukiman. Dari situ kita menerima penghasilan dari 1 hektar tanah seharga Rp 15 juta," ungkapnya.

Saat ini, Pemdes Kempek pun tak berdiam diri. Mereka berjiwa merombak ulang dengan memanfaatkan lahan titisara untuk dibangun kedai dan spot wisata sebagai upaya kemandirian desa. Mereka berkeyakinan akan menghasilkan omzet yang tinggi. Selanjutnya, kata Urip, omzet tersebut nantinya akan masuk kas desa dan menambah pundi-pundi PAD.

Urip akan terus berusaha merealisasikan pembangunan kedai kopi dan wisata. Sebab ia berharap dapat membantu perekonomian warga. Ia pun berjanji, baik wisata dan kedai kopi yang direncanakan akan dikelola oleh warga lokal yang masih belum bekerja.

"Insya Allah program tersebut secepatnya bisa diselesaikan, karena ini salah satu gebrakan besar Pemdes Kempek untuk kesejahteraan masyarakat," katanya. •**Lan**

Mohamad Luthfi



Merdeka Sing Corona

Indonesia belum merdeka. Satu setengah tahun sudah Indonesia berjuang. Namun, kemenangan itu belum jua di tangan. Sejak Maret 2020, ketika presiden mengumumkan perang melawan covid-19, hingga kini Indonesia belum terbebas. Lantas kapan Indonesia bisa bergelar MSC, alias *merdeka sing corona*? Bisakah?

Hingga pertengahan Agustus, warga Indonesia yang terinfeksi covid-19 per harinya masih di atas 20.000. Bukan angka yang kecil. Sebaran merah-nya pun masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia.

Total sudah 3.854.354 orang yang terkonfirmasi positif covid-19. Namun, sebagian kalangan meyakini bisa tiga kali lipat dari data Kemenkes tersebut. Banyak orang yang positif tidak melapor atau terdita. Bahkan, adapula yang secara gejala kuat mengindikasikan terinfeksi, namun *ogah* tes swab.

Bersyukur, dari sejumlah itu, ada sebanyak 3.351.959 yang dinyatakan sembuh. Mereka menyangand predikat LC, alias lulus covid. Tentu saja banyaknya LC, tidak serta merta membuat Indonesia meraih predikat MSC. Perang masih belum selesai. Daerah merah masih menyala.

Dalam perjuangan itu tak sedikit pula yang gugur, tercatat ada 117.588 orang meninggal dengan status positif covid-19. Lagi-lagi banyak yang meyakini angkanya lebih dari itu. Namun, ini bukan soal angka. Ini soal nyawa. Satu saja sangat berarti. Belum lagi, pengorbanan atau kerugian dari aspek lainnya.

Jika dibandingkan penjajahan zaman kolonial, maka perang melawan covid-19 ini penderitaan/kerugiannya tidak jauh beda. Bidikan penjajah adalah kekayaan alam negeri ini. Namun, dampaknya pada kesehatan/hilangnya nyawa, kebodohan, hingga kemandirian/kemerdekaan bangsa.

Bagaimana dengan serangan covid-19? Hampir mirip. Hanya saja, bidikan awal virus tentu kesehatan. Dampaknya, pada ekonomi yang kian terpuruk, sekolah mandeg, hingga kemandirian bangsa atas

kebutuhan obat, alkes, hingga vaksin.

Jika masalah itu kita teropong hingga ke individu, maka dampak serangan virus ini semakin terlihat. Orang yang sehat dan kesulitan ekonomi dibatasi ruang geraknya. Keberlangsungan hidup terancam.

Sementara yang terinfeksi harus berhadapan dengan obat, vitamin, oksigen, dan ruang perawatan yang langka. Kalaupun ada, harganya selangit. Sudah ekonomi sulit, sakit, harga pengobatan selangit. Sungguh, bukan fase mudah.

Jika bangsa ini (Anda), kini merasakan penderitaan itu, maka bayangkanlah penderitaan pendahulu kita yang dijajah selama 350 tahun. Hanya makan gaplek, dipaksa kerja rodi. Sehat, dicambuk agar bekerja. Sakit, terbuang sia-sia.

Setelah itu, ingatlah: apa yang membebaskan mereka dari penjajahan? Senjata canggih, senapan mesin, meriam, bom, pesawat tempur atau kendaraan lapis baja? Tidak. Untuk makan saja sulit, *boro-boro* buat beli alat perang yang canggih. Mirip seperti perang melawan corona, bukan? Bahkan, mungkin sekarang kondisinya lebih baik.

Lantas apa yang membuat mereka menyatakan kemerdekaan? Semangat persatuan. Dengan persatuanlah kotak-kotak perjuangan, melebur menjadi satu kekuatan besar. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa: Indonesia.

Pelajaran dari para pendahulu itu sangat berharga, dan relevan kita terapkan dalam perang kali ini. Jika rakyat dan pemerintah tidak bersatu, sulit corona sirna. Jika masih ada yang memanfaatkan masa-masa sulit ini untuk kepentingan dan memperkaya pribadi, maka jangan harap kita meraih MSC.

Jika penderitaan selama 350 tahun saja bisa dikalahkan, maka kesempatan selama satu setengah tahun ini harusnya bisa cepat diakhiri. Tetaplah semangat Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76. Dirgahayu Indonesia!



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

DIRGAHAYU
INDONESIA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



70TH

INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

DIRGAHAYU
INDONESIA